

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan dari suatu negara. Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari peran peningkatan mutu SDM atau pembentukan modal manusia. Pembentukan modal manusia adalah proses dan memperoleh peningkatan jumlah orang yang mempunyai keahlian pendidikan dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. Meningkatnya nilai IPM menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas pada suatu daerah. Sumber daya manusia merupakan subjek dan objek pembangunan, hal ini mengindikasikan bahwa manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan. Dengan demikian, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan unsur pembangunan yang sangat penting.

Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh

karenanya dibutuhkan investasi untuk dapat menciptakan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, seperti investasi di sektor kesehatan dan pendidikan. Salah satu peran pemerintah dalam mendorong kesejahteraan dan kemakmuran adalah peran alokatif. Dengan peran ini, pemerintah dapat mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada agar optimal dan efisien. Bentuk nyatanya adalah pemerintah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Sebagaimana diketahui bahwa cakupan fiskal ini sangat luas, maka fiskal yang dimaksudkan adalah pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan dan pendidikan. Sementara kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dalam hal ini diarahkan pada parameter yang sudah menjadi parameter internasional dalam hal kesejahteraan yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Dalam ilmu ekonomi sektor kesehatan dan pendidikan telah diyakini memainkan peran yang vital dalam pembangunan. Produktivitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh tingkat kesehatan yang berpengaruh pada keberhasilan tingkat pendidikan dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kesehatan dan pendidikan juga dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital. Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan

keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan (Meier dalam Winarti, 2014: 41). Oleh sebab itu, dukungan pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan aspek kesehatan dan kesehatan melalui pengeluaran pemerintah.

Selain dari sektor pendidikan dan sektor kesehatan terdapat faktor lain yang dianggap penting dalam peningkatan IPM adalah dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerah tersebut, yang merupakan basis utama bagi daerah sehingga ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat melalui dana perimbangan semakin berkurang dan pada akhirnya daerah memiliki kekuatan dalam memenuhi segala kebutuhannya terkait dengan prosedur pelayanan publik.

Ketimpangan pendapatan adalah menggambarkan distribusi pendapatan di suatu negara pada kurun waktu tertentu (Tarigan, 2002). Pembangunan manusia perlu dilakukan untuk mengurangi Ketimpangan Pendapatan antar daerah/ kota. Salah satu hasil studi William Easterly (2006) mengungkapkan bahwa tingkat ketimpangan (*inequality*) yang tinggi merupakan penghambat dari kemakmuran, dan berkembangnya pendidikan yang bermutu tinggi. Masalah ketimpangan pendapatan telah lama menjadi persoalan yang rumit dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh sejumlah negara-negara miskin maupun negara-negara berkembang. seperti indonesia. Ketimpangan Pendapatan

terjadi akibat adanya distribusi pendapatan yang kurang merata di sejumlah wilayah di suatu negara.

Di Indonesia indeks pembangunan manusia meningkat setiap tahunnya. Salah satunya Provinsi Jawa Timur yang memiliki angka Indeks Pembangunan Manusia menengah. Pemerintah melakukan pengeluaran atau investasi yang ditujukan pada pembangunan manusia yakni bidang pendidikan dan kesehatan yang merupakan sektor yang sangat vital dalam pembentukan modal manusia yang akan berdampak pada pembangunan suatu daerah. Biaya tersebut didanai dari anggaran pemerintah yang menjadi pengeluaran bagi pemerintah. Hal ini terjadi tidak luput dari faktor kesehatan dan faktor pendidikan yang digagas oleh pemerintah setempat. Berikut Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur di lihat dari tabel 1-1 berikut:

**Tabel 1-1**  
**Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan, Belanja Sektor Pendidikan dan (IPM) Provinsi Jawa Timur (2015-2019)**

| <b>Tahun</b> | <b>Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (Rp)</b> | <b>Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (Rp)</b> | <b>IPM (%)</b> |
|--------------|---|--|----------------|
| 2015         | 7.652.773.504.332                                   | 28.381.390.573.186                                   | 68,95          |
| 2016         | 16.236.539.279.762                                  | 30.393.426.679.619                                   | 69,74          |
| 2017         | 13.046.364.189.426                                  | 26.791.790.603.377                                   | 70,27          |
| 2018         | 14.793.889.227.047                                  | 28.880.098.996.783                                   | 70,77          |
| 2019         | 16.153.399.202.431                                  | 30.020.642.843.244                                   | 71,50          |

Sumber : DJPK dan BPS Jawa timur 2015-2019.

Dari tabel 1-1 terlihat IPM Provinsi Jawa Timur meningkat di setiap tahunnya dan memiliki nilai IPM sebesar 0,50 sampai 0,79 yang artinya IPM Provinsi Jawa Timur termasuk ke dalam kelompok wilayah dengan tingkat pembangunan

manusia menengah dimana IPM Provinsi Jawa Timur menduduki ranking ke-15 diantara 32 provinsi di Indonesia. Pada tahun 2019 IPM Provinsi Jawa timur mengalami kenaikan sebesar 1,03%. Rata- rata pertumbuhan IPM pertahun adalah 0,99%. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah Jawa Timur untuk meningkatkan pembangunan manusia cukup berhasil. Keberhasilan ini dapat dilihat dari perubahan kategori untuk beberapa wilayah. Meningkatnya pembangunan manusia di Jawa Timur setiap tahun, karena adanya kenaikan masing-masing komponen pembentuknya antara lain umur harapan hidup (UHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS) dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan serta di sektor kesehatan untuk umur panjang dan hidup sehat pada kurun waktu 2015-2019, rata-rata umur harapan hidup tumbuh sebesar 0,15% per tahunnya. Hal ini menunjukkan ada perbaikan pembangunan kualitas kesehatan pada wilayah tersebut.

Tabel 1-1 memperlihatkan perkembangan realisasi pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dalam Belanja Daerah dan realisasi anggaran belanja daerah di Provinsi Jawa Timur periode 2015-2019. Rata-rata realisasi pengeluaran pemerintah di Provinsi Jawa Timur pada sektor kesehatan meningkat pada tahun 2016 dan 2019, sementara pada tahun 2015, 2017, dan 2018 mengalami penurunan dalam realisasi anggaran belanja sektor kesehatan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Realisasi pengeluaran belanja pemerintah Provinsi Jawa Timur di sektor pendidikan rata-rata meningkat, peningkatan terjadi pada tahun 2016 dibanding dengan tahun sebelumnya,

sedangkan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2017. Peningkatan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan Provinsi Jawa Timur merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia. Hal ini diharapkan akan berdampak positif bagi kesejahteraan di Provinsi Jawa Timur.

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis ingin mengetahui seberapa besar pengaruh dari ketimpangan pendapatan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, penulis memilih untuk mengangkat judul “Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Seluruh Kabupaten Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 ?
2. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 ?
3. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 ?

4. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 ?
5. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019
2. Untuk menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019.
3. Untuk menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019.
4. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019.

5. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Sebagai salah satu informasi dalam pembuatan kebijakan ekonomi mengenai pembangunan manusia dalam hal peningkatan sumber daya manusia. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan bahwa pemerintah perlu melakukan upaya yang sinergis dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi sebagai pendorong upaya peningkatan IPM di Provinsi Jawa Timur.
2. Di sisi akademik, penelitian ini diharapkan memperdalam ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat menambah wawasan penelitian sejenis yang telah ada dan sebagai perbandingan seseorang yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **E.1 Alat Dan Model Penelitian**

Untuk mengetahui pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini mereplikasi dari penelitian yang diteliti oleh Kahang (2016) dan Zulfanetti (2020). Penelitian ini menggunakan data panel dengan *cross section*



berjumlah 29 Kabupaten di Jawa Timur dan *time series* tahun 2015-2019 dengan model ekonometrik sebagai berikut :

$$IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 KP_{it} + \beta_2 PPSK_{it} + \beta_3 PPSK_{it} + \beta_4 PAD_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

|                           |  |
|---------------------------|--|
| $IPM_{it}$                | = Indeks Pembangunan Manusia               |
| $KP_{it}$                 | = Ketimpangan Pendapatan                   |
| $PPSK_{it}$               | = Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan  |
| $PPSP_{it}$               | = Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan |
| $PAD_{it}$                | = Pendapatan Asli Daerah                   |
| $\varepsilon$             | = <i>Error term</i> (faktor kesalahan)     |
| $\beta_0$                 | = Konstanta                                |
| $\beta_1, \dots, \beta_3$ | = Koefisien regresi variable independen    |
| $i$                       | = observasi ke $i$                         |
| $t$                       | = tahun ke $t$                             |

## E.2 Data dan Sumber Data

Data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah data panel dalam kurun waktu tahun 2015 sampai 2019, yang meliputi data Ketimpangan Pendapatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari 29 kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran isi penelitian. Adapun skripsi ini dilakukan dengan sistematika berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Pada pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode analisis data

serta ditutup dengan sistematika pembahasan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka berisikan penjelasan tentang landasan teori-teori pada penelitian ini yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Disajikan juga beberapa penelitian terdahulu dan pada akhir bab dirumuskan hipotesis sebagai acuan dalam penelitian.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menjelaskan tentang alat dan model analisis, definisi operasional variabel, serta jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahasan berisikan uraian penjelasan tentang analisis deskriptif, lalu disajikan hasil estimasi serta interpretasi kuantitatif dan interpretasi ekonomi.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan yang merupakan intisari dari hasil pembahasan, dan diakhiri dengan saran untuk memperbaiki kelemahan yang terdapat dalam penelitian ini, baik bagi otoritas pembuat kebijakan ekonomi dan *stakeholder*, serta bagi penelitian selanjutnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**